

Penelitian Individu

**PENERAPAN KONSEP DARURAT
(Studi pada Pencegahan Kehamilan dengan Sterelisasi
dalam Hukum Islam)**



Oleh:
NORWILI, M.HI

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALANGKA RAYA
TAHUN 2014**

Penelitian Individu

**PENERAPAN KONSEP DARURAT
(Studi pada Pencegahan Kehamilan dengan Sterelisasi
dalam Hukum Islam)**



Oleh:
NORWILI, M.HI

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALANGKA RAYA
TAHUN 2014**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL**

1. Judul Penelitian : **PENERAPAN KONSEP DARURAT
(Studi pada Pencegahan Kehamilan dengan
Sterelisasi dalam Hukum Islam)**
2. Peneliti : Norwili, M.HI
3. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan (Juni – Nopember 2014)
4. Sumber Dana : DIPA STAIN Palangka Raya Tahun 2014
5. Biaya Penelitian : Rp. 4.000.000,-

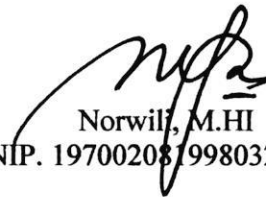
Palangka Raya, Desember 2014

Mengetahui:
Kepala P3M,



Rahmadi Nirwanto, M.Pd
NIP. 197001312002121002

Peneliti,



Norwili, M.HI
NIP. 197002081998032001

Disahkan oleh
Ketua STAIN Palangka Raya,



Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH. MH
NIP. 19750109 199903 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II. HUKUM ISALAM

A. Pengertian Hukum Islam.....	12
B. Asas-asas Hukum Islam.....	14
C. Pengertian Sterelisasi dalam hukum Islam.....	19
D. Macam-macam Sterelisasi.....	21

BAB III. KONSEP DARURAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Islam tentang konsep darurat.....	23
B. Batasan-batasan darurat.....	25

BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Konsep hukum Islam dalam keadaan darurat.. ..	33
B. Penerapan Hukum Islam bagi kemaslahatan Pribadi dengan sterelisasi	34

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan.....	46
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

PENERAPAN KONSEP DARURAT
(Studi pada Pencegahan Kehamilan dengan Sterilisasi
dalam Hukum Islam)

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya manusia menjalani kehidupan yang biasa dan wajar, pada tempat dan masa keadaan tertentu seseorang mengalami hal-hal di luar kemampuannya untuk menolak, menghindari dan mengatasinya, seperti menghindari dari keadaan yang membahayakan hidupnya. Ketetapan-ketetapan hukum Islam kadangkala menyebabkan dibolehkannya yang dilarang. Banyak orang yang menggunakan argumentasi darurat, lebih-lebih lagi di masa sekarang ini dengan tujuan untuk membolehkan yang diharamkan, atau untuk meninggalkan yang wajib dengan alasan prinsip peringanan atau pemudahan bagi umat Islam, atau karena ketidaktahuan mereka tentang ketentuan-ketentuan hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, menggunakan metode *library research*, dengan langkah-langkah yaitu: Pengumpulan data melalui membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan materi pembahasan, yang kemudian peneliti jadikan bahan dan sumber telaahan bagi pengolahan data.

Hasil penelitian ini adalah 1) Penerapan konsep hukum Islam dalam keadaan darurat bahwa agama Islam sangat memperhatikan kemaslahatan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan kecuali apabila berhadapan dengan kemaslahatan yang lebih besar, atau merugikan orang lain. Syariat Islam membolehkan keadaan darurat serta hal-hal yang diperlukan demi kemaslahatan umum, 2) Sterilisasi dalam pandangan Islam adalah diharamkan dikarenakan merubah bentuk ciptaan Allah, dengan sterilisasi/diangkat atau dibuang potensi untuk mempunyai keturunan tidak ada lagi. Namun demikian Syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan pribadi seseorang, dan kemaslahatan pribadi ini tidak bisa ditinggalkan, artinya jika tidak dilakukan sterilisasi kandungan akan mengancam jiwanya, sesuai dengan kaidah fiqh yaitu; jika ada dua bahaya saling mengancam maka waspadai yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang paling ringan bahayanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya sehingga penelitian dengan judul, **“PENERAPAN KONSEP DARURAT (Studi pada Pencegahan Kehamilan dengan Sterelisasi dalam Hukum Islam)”** sehingga dapat terselesaikan penelitian sesuai rencana yang diinginkan..

Peneliti menyadari bahwa selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
2. Kepala perpustakaan STAIN Palangka Raya dan staf.
3. Seluruh pihak yang membantu terlaksanya penelitian ini.

Tak lupa Peneliti mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak, apabila dalam penulisan penelitian ini terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik dan saran Peneliti harapkan guna perbaikan mutu penelitian di masa yang akan datang.

Demikian laporan penelitian ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Amin

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Desember 2014

Peneliti,

Norwili, M.HI
NIP. 197002081998032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara utuh bertujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan manusia lainnya maupun alam.

Sebagai umat Islam, diakui bahwa memang banyak masalah baru yang tidak terdapat penyelesaiannya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena al-Qur'an menjelaskan sesuatu tidak dengan detail, akan tetapi menjelaskan dengan segala sesuatu yang bersifat *al-qawan al-ammah* (aturan-aturan umum) dan *al-mabadi al-kuliyyah* (prinsip-prinsip yang universal) yang dapat diaplikasikan untuk semua kasus dan problem yang muncul dalam kehidupan manusia baik selaku pribadi, selaku ummat, baik mereka yang hidup dimasa lalu, masa kini dan akan datang. Demikian pula Nabi Muhammad sendiri dalam menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan umum itu tidak selalu dalam bentuk detail, kecuali yang menyangkut masalah ibadah dan hukum keluarga. Sebaliknya penjelasan beliau yang menyangkut masalah-masalah yang lain, di samping tidak pula bersifat rinci, juga tidak menyeluruh, bahkan penjelasan-penjelasan beliau itu tidak selalu

bersifat difinitif, tetapi pada umumnya hanya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa beliau.

Untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak ada penegasan tentang hukum-hukumnya di dalam alQur'an dan al-Sunnah, maka para pakar Hukum Islam (fukaha) berupaya memecahkan dan mencari hukum-hukumnya dengan menggunakan ijtihad.

Ijtihad tidak boleh lepas dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian, para pakar hukum Islam dan para mujtahid dapat mengelompokkan masalah-masalah yang serupa dan di bawah satu lingkup satu kaidah.

Adapun bunyi kaidah ushuliyah yang dimaksud adalah tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan dan melenyapkan bahaya, karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang salah satunya bersifat *dharuriyah*. *Dharuri* yaitu suatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia (primer). Apabila tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran. Hal-hal yang bersifat primer (*dharuri*) bagi manusia dalam pengertian ini

berpangkal kepada memelihara lima perkara: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta menyesuaikan dengan maksud dan tujuan syari'at (*al-maqashid al-syari'ah*). Jadi memelihara salah satu di antara lima perkara adalah merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.¹

Dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya manusia menjalani kehidupan yang biasa, wajar dan mulus. Pada tempat dan masa tertentu tidak mustahil akan mengalami ahal-hal yang berada di luar kemampuannya untuk menolak, menghindar dan mengatasinya. Dengan kata lain, terjadinya suatu keadaan yang dapat membahayakan hidupnya, seperti adanya ancaman dari orang lain, sulit mendapatkan makanan, penyakit atau lainnya.

Dalam keadaan seperti yang digambarkan di atas, apabila kita menyandarkan kepada prinsip dasar keadilan dan kemaslahatan umat manusia, maka Islam menawarkan jalan keluar berupa pengecualian-pengecualian. Jalan keluar ini membuat beberapa tuntutan ukhrawi dapat terhapuskan atau dengan perkataan lain akan tidak berakibat dosa dan siksa akhirat. Artinya pengecualian ini mempermudah manusia dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya menurut keadaan yang sesuai dengan kenyataan hidup dan pribadi-pribadi manusia yang berbeda

¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, Fikih Darurat, Diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq dari aslinya Al-Idhthirar Ilal Ath'imah Wal Adwiyah Al-Muharramaat (Jakarta Pustaka Azzam, 1996), h. 11

Dengan demikian, tentu menimbulkan pertanyaan bahwa sebagian manusia dalam menghadapi musibah atau kesulitan, ada yang sangat mudah menggunakan argumentasi darurat. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang ini dengan tujuan untuk membolehkan yang diharamkan dan meninggalkan yang wajib dengan alasan prinsip agar mendapat keringanan atau kemudahan bagi dirinya, seperti contoh orang yang sangat membutuhkan biaya pengobatan isterinya keluarga yang sakit, sedangkan dia tidak punya uang dan tidak ada pula yang bersedia meminjamkannya, lalu dia meminjam ke pendanaan dengan system bunga, atau pencegahan kehamilan dengan melakukan sterilisasi dan lain sebagainya, Dalam sangkaan mereka tidak ada jalan keluar untuk menghindari perbuatan haram tersebut, apakah terdapat jalan yang membenarkan tindakan tersebut, atau apakah pendapat mereka mempunyai dasar, atau apakah mereka dapat melepaskan dari dosa yang haram melalui pintu darurat. Apakah pintu darurat yang mereka pegang sebagai hujjah merupakan *darurat syar'i* yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya dan dipandang sebagai salah satu keluwesan hukum Islam yang toleransi dan ketetapannya untuk semua masa dan tempat? Padahal, penerapan konsep darurat yang ada pada hukum Islam mempunyai pengertian dan batasan-batasan yang jelas dan tegas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam lagi tentang **PENERAPAN KONSEP**

DARURAT (Studi pada Pencegahan Kehamilan dengan Sterelisasi dalam Hukum Islam)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dalam bab pendahuluan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana hukum Islam mengatur penerapan konsep hukum dalam keadaan darurat?
2. Bagaimana hukum Islam mengatur penerapan hukum darurat bagi kemaslahatan pribadi dengan sterelisasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

3. Untuk mendiskripsikan ketentuan hukum dalam keadaan darurat.
4. Untuk mendiskripsikan hukum Islam mengatur penerapan hukum darurat bagi kemaslahatan pribadi dengan sterelisasi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami bagi peneliti tentang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum darurat pada Pencegahan Kehamilan dengan Sterelisasi dalam Hukum Islam.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya masyarakat Islam. diharapkan dapat menambah pemahaman terhadap masalah penerapan hukum darurat pada Pencegahan Kehamilan dengan

Sterelisasi dalam Hukum Islam bagi kemaslahatan dengan segala aspek dan ketentuan hukumnya.

3. Sebagai bahan literature bagi perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap istilah yang dipergunakan, sekaligus adanya kesatuan pemahaman dan pengertian, maka diperlukan sekali adanya suatu definisi operasional guna memudahkan penelitian dan pengkajian terhadap masalah yang dibicarakan. Dalam peneilitian ini digunakan definisi-definisi sebagai berikut:

1. Konsep darurat. Dalam kamus al-Muhith, makna *al-idhthirar* ialah *al-ihdiyaj ila al-syai'*, yang berarti membutuhkan sesuatu. Dan makna kalimat *idhtharrahu ilaihi* ialah, *ahwajuhu wa alja'ahu* yang berarti seseorang sangat membutuhkan sesuatu itu. Kalimat benda (isim)nya ialah *adh-dharrah*. Dharurat sama dengan *al-hajat* yang berarti kebutuhan. Ia juga sama seperti kalimat *adh-dharuurah*, dan *adh-dharuuraa'*. *Adhdharar* berarti sempit.
2. Hukum Islam. Istilah "Hukum Islam" merupakan istilah khas Indonesia dari al-Syari'ah al-Islamy.

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia (Rofiq, 2000: 9).

Dari sisi metodologis, “Hukum Islam” dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau *ijtihad*

3. Sterilisasi merupakan suatu tindakan/metode untuk memandulkan wanita atau peria, bagi seorang wanita tidak dapat hamil lagi.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Bambang Waluyo penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal. Dalam penelitian ini penulis akan melukiskan atau menggambarkan dan menganalisa tentang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum darurat pada Pencegahan Kehamilan dengan Sterilisasi dalam Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif atau doktriner. Soemitro (1990) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Metode pendekatan yuridis normatif ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada norma dasar, yaitu Alquran dan Hadis.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bidang hukum dalam tentang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum darurat pada Pencegahan Kehamilan dengan Sterelisasi dalam Hukum Islam tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sejumlah bahan pustaka yang berkaitan dengan data yang digali. Dalam penelitian normatif dipergunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka. Data sekunder berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya terbagi tiga, yaitu : *Pertama*, bahan hukum primer ialah bahan yang isinya mengikat, terdiri dari:

- 1) Ayat-ayat Alquran dan Hadis.
- 2) Kaidah-kaidah fiqh

Kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa : buku-buku tambahan mengenai penerapan konsep darurat sebagaimana yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Serta bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik:

- a. Survey kepustakaan, yaitu meneliti berbagai literature yang didapat di perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan instansi maupun perpustakaan pribadi, berupa buku-buku, kitab-kitab dan bahan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- b. Literer, yakni mempelajari, menelaah dan mengkaji setiap bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan dibahas.

5. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan mengadakan kegiatan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum dan kontruksi.

- a. Penelaahan dan pengkajian terhadap kontep-konsep hasil yang telah diteliti.

- b. Memilih ayat-ayat Alquran, dan yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah sterilisasi.
- c. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.

Kerangka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data non statistic, sekedar mendeskripsikan dari data yang ada, kemudian memberikan uraian serta penafsiran untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari berbagai aspek penelitian. Untuk selanjutnya mengacu pada sistematika pembahasan yang disiapkan.

6. Waktu Penelitian

Untuk menyusun hasil penelitian ini menjadi sebuah hasil bacaan berwujud karya ilmiah, maka penulis memerlukan waktu sekitar 4 bulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan sistematika pembahasan yang sederhana, yaitu:

Pada Bab Pertama, tentang pendahuluan berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab Kedua, Hukum Islam, asas-asas hukum Islam, Islam tentang darurat, Batasan-Batasan Darurat, sterilisasi

Pada Bab Ketiga, tentang Penerapan darurat, batasan-batasan darurat dalam hukum Islam dan implikasi darurat bagi perubahan hukum Islam, beberapa pendapat tentang sterilisasi.

Pada Bab Keempat, pembahasan hasil temuan penelitian.

Pada Bab Kelima, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam dalam konteks ajaran Islam dapat dikategorikan sebagai fiqh atau syari'at. Dalam konteks ilmu ushul fiqh terdapat pula istilah hukum. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan definisi hukum Islam dalam istilah ushuliyyin dan istilah fuqaha, yaitu:

“Hukum syara’ menurut istilah ahli ushul adalah: Khitab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal); baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan”.²

Sedangkan menurut istilah ahli fiqh adalah: “Pengaruh yang ditimbulkan oleh doktren syar’I dalam perbuatan (mukallaf), seperti kewajiban, keharaman dan kebolehan”³

Manna’ al-Qathan, mendefinisikan syari’at Islam sebagai berikut:

Syari’at Islam menurut istilah: Syariat Allah bagi hamba-Nya yang mencakup masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan system kehidupan dalam berbagai bidang, untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.⁴

Mahmud Dyaltut, mengatakan bahwa: Syari’at ialah susunan, peraturan dan ketentuan yang disyari’atkan Tuhan dengan lengkap

² Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, terjemah; Halimuddin (Jakarta: PT Renika Cipta, 1999) h.119

³ *Ibid*

⁴ Manna’ al-Qathan, al-Tasyri’ wa al-fiqh fi al-Islam, (Bairut: Muasasah al-Risalah, 1987), h.15

atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan Tuhan hubungan dengan saudara seagama, hubungan dengan saudaranya sesama manusia serta hubungannya dengan alam besar dan kehidupan.⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa hukum Islam sebenarnya tidak lain adalah fiqh Islam, atau syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶

Said Agil berpendapat bahwa hukum Islam adalah: “Seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya dan Ijtihad para ulil al-Amri”.⁷

Kata hukum Islam tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan literature hukum dalam Islam, yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syari'at, fiqh, dan hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari literature Barat, dengan definisinya yaitu: “keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”.

Jadi, jelaslah bahwa hukum Islam adalah susunan, peraturan dan ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah (al-Qur'an), Sunnah Rasul-Nya dan Ijtihad para mujtahid yang dimaksudkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia baik berupa tuntutan,

⁵ Mahmud Syaltut, Akidah dan Syari'at Islam, Alih bahasa: Fachruddin HS, (Jakarta: Bina Aksara, 1996) h. 13

⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: PT.NPustaka Rizki Putra, 2001), h. 29

⁷ Said Agil Husain Al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004).h.7

pilihan atau ketetapan supaya tercapai kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat.

B. Asas-asas Hukum Islam

Secara garis besar asas-asas (dasar-dasar) pembinaan hukum Islam yang dikatakan *Daimut Tasyri* (tiang-tiang pokok pembinaan hukum), ialah

- a. Meniadakan kepicikan dan tidak menyulitkan (‘adam al-Haraj)
- b. Menyedikitkan beban (Qillatul Takalif)
- c. Berangsur-angsur dalam membina hukum (Tadarruj Fi al-Tasyri’)⁸

1. Meniadakan kepicikan dan tidak menyulitkan (‘adam al-Haraj)

Kedaaaa

n ini sangat diperhatikan oleh pengatur hukum Islam atau pembuat hukum Islam. Karenanya segala taklif Islam berada dalam-batas-batas kemampuan para mukallaf sebagaimana firman Allah

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

... Artinya dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...⁹

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...¹⁰

⁸ Huhari Bik, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, Terjemah: Moh. Zuhri, (Darul Ikhyia Indonesia, 1980) h..31

⁹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989). H. 523

¹⁰ Ibid h. 72

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....

Segala hukum Islam yang diwahyukan Allah, tak ada di dalamnya sesuatu yang menimbulkan kesulitan yang sukar dipikul manusia. Hal ini tidak berarti bahwa taklif syar'i tidak mengandung kesukaran barang sedikit juga, kesukaran yang sedikit itu memanglah cirri khas hukum taklifi. Para fuqaha menta'rifkan taklif dengan “mengaharuskan sesuatu yang padanya ada yang memberatkan”.^{11u}

Kesukaran yang harus ditiadakan itu adalah kesukaran yang melebihi batas biasa, yaitu yang menghabiskan tenaga. Dalam pelaksanaan hukum terkadang timbul kesukaran-kesukaran, maka Allah SWT mengadakan hukum *rukhsah*. Contohnya antara lain kebolehan untuk tidak berpuasa ketika sakit, dalam perjalanan (safir), pada masa mengandung dan menyusui anak, dan juga kebolehan shalat dengan duduk jika tidak sanggup berdiri.

2. Menyedikitkan Beban (Qilllatul Takalif)

Asas kedua dari asas-asas hukum Islam, tidak membaanyak kan hukum taklif, agar tidak memberatkanpundak mukallaf dan tidak menyukarkan. Dasar ini ditetapkan dengan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, h. 60

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.¹²

Ayat tersebut di atas, mengharuskan para sahabat menyedikitkan pertanyaan mengenai masalah-masalah yang belum diterangkan hukumnya, agar masalah-masalah itu perkembangan masyarakat apabila timbul nanti dapat dihasilkan hukumnya dari kaidah-kaidah umum sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Masalah-masalah yang dilarang ini adalah sesuatu yang telah dimaafkan oleh Allah, yakni didiamkan pengharamannya. Seandainya mereka tidak menanyakannya niscaya hal itu diampuni dalam meninggalkannya. Mereka boleh memilih dalam melakukannya atau meninggalkannya.

3. Berangsur-angsur dalam membina hukum

Ketika Nabi SAW, datang dengan membawa Islam, kondisi bangsa Arab pada waktu itu telah lama bergelimang dalam aneka adat istiadat, tentulah adat istiadat itu ada yang baik (pantas) untuk dikekaikan dan ada yang tidak pantas sehingga harus ditinggalkan.

Salah satu adat istiadat yang ada pada masa itu adalah perjudian dan minum khamar dan dalam pengharaman khamar melalui tiga tahapan, yaitu:

¹² Depag RI, op.Cit., h.179

Pertama; ketika Nabi saw datang ke madinah, dan para sahabat minum khamar dan makan harta perjudian. Merka bertanya kepada Nabi tentang dua masalah tadi, maka turunlah ayat di bawah ini:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣٦﴾

mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,¹³

Kedua; Dari ayat di atas mereka berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang tetapi hanya merupakan dosa besar, sehingga mereka pun masih minum khamar, sampai datang suatu saat, seorang muhajirin shalat dan menjadi imam di waktu maghrib, lalu bacaanya kacau, maka Allah menurunkan ayat yang lebih tegas, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿١٣٧﴾

¹³ Depag RI, h 53

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,

Selain asas-asas hukum Islam tersebut di atas, Hasbi Ash-Shiddiqi menambahkan bahwa salah satu asas-asas pembinaan hukum Islam adalah hukum Islam itu telah ditetapkan, dimansuhkan kembali karena dikehendaki oleh kemaslahatan masyarakat yang terus berkembang.

Menurut Abu Zahrah, bahwa tujuan umum Hukum Islam ada tiga macam. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bias menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam; adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim).
3. Memelihara atau menciptakan kemaslahatan manusia, sekaligus menghindarkan dari mafsadat (hal-hal yang merusak), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif (pembebanan syari'at), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama dalam Islam, Al-Qur'an dan Hadist.

C. Pengertian Sterilisasi dalam Hukum Islam

Syari'at Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuhan maupun manusia (terutama) yang menyandang gelar khalifah di bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.

Masjfuluk Zuhdi berpendapat bahwa sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan.¹⁴

Sterilisasi berbeda dengan cara-cara/alat-alat kontrasepsi lain yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Sedangkan sterilisasi secara teori masih bisa dipulihkan lagi tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan tipis untuk berhasil.

Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau *Vas Ligation*. Caranya ialah dengan memotong saluran sperma (vas deferent) kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra). Sterilisasi laki-laki termasuk operasi

¹⁴ Masjfuluk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Surya Grafindi, 1997), h.67

ringen. Tidak melakukan operasi di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual.

Sterilisasi pada wanita tubektomi atau Tubal Ligation. Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (tuba pallopi) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.

Dalam kaitannya dengan vasektomi dan tubektomi Majelis Ulama Indonesia telah membahas dengan pendapat-pendapat; Pertama, pemandulan dilarang oleh agama. Kedua, Vasektomi dan Tubektomi adalah usaha salah satu usaha pemandulan. Ketiga, di Indonesia dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi, dapat disambung lagi, dengan alasan tersebut MUI mengeluarkan fatwa, bahwa dalam penggunaan vasektomi dan tubektomi adalah haram. Fatwa ini kemudian diperkuat lagi dalam sebuah siding Muktamar Nasional Ulama, tentang kependudukan dan Pembangunan. Yang menghasilkan keputusan fatwa yang menyatakan bahwa vasektomi dan tubektomi dilarang dalam Islam karena berakibat kemandulan yang abadi.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang lain yang

pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, kecuali dalam keadaan darurat. selain itu bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan kesehatan.¹⁵ Permasalahan pembatasan keturunan secara permanen atau sterilisasi merupakan sesuatu yang diperselisihkan kecuali jika terdapat indikasi yang jelas dan konfirmasi oleh ahli kesehatan yang kompeten bahwa kehamilan selanjutnya benar-benar dapat menimbulkan bahaya bagi wanita.

D. Macam-macam Sterilisasi

Ada beberapa cara yang sering dilakukan dalam proses sterilisasi, diantaranya:

- 1) Cara Radiasi; yaitu dengan merusak fungsi ovarium, sehingga tidak dapat lagi menghasilkan hormon-hormon, yang mengakibatkan wanita menjadi menopause.
- 2) Cara operatif, yaitu dengan cara operasi, cara ini terdiri dari beberapa teknik, diantaranya adalah:
 - a. Ovariectomi, yaitu mengangkat atau memiringkan kedua ovarium yang efeknya sama dengan cara radiasi.
 - b. Tubectomi, yaitu mengangkat seluruh tuba agar wanita tidak bisa lagi hamil, karena saluran tersebut sudah bocor.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, h. 67

- c. Ligasi Tuba, yaitu mengingakat tuba, sehingga tidak dapat lagi dilewati ovum (sel-sel). Cara penyumbatan Tuba, menggunakan zat-zat kimia untuk menyumbat tuba, dengan tehnik suntikan.

BAB III

KONSEP DARURAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Islam Tentang Konsep Darurat

Darurat mempunyai banyak definisi, Diantara definisi darurat itu adalah sebagai berikut

Dalam kamus al-Muhith, makna *al-idhthirar* yang berarti membutuhkan sesuatu. Dan makna kalimat *idhtharrahu ilaihi ialah, ahwajuhu wa alja'ahu* yang berarti seseorang sangat membutuhkan sesuatu itu. *Dharurat* itu sama dngan hajat yang berarti kebutuhan.

Rasyid Ridha menjelaskan yang dimaksud dengan *Idhthiraar*, yaitu: “upaya seseorang untuk mempertahankan diri dari hal-hal yang membahayakan atau membebaninya atau memaksanya”¹⁶

Selanjutnya, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa kalimat *idhthirar* ini memakai shighat ifti'al yang makna aslinya ialah kesempitan. Shighat seperti itu menunjukkan arti melakukan sesuatu dengan susah payah. Jadi, *idhtirar* ialah membebani sesuatu yang membahayakan yang mendorong seseorang terpaksa harus melindungi sesuatu yang ingin dilindungi. Dalam hal ini ialah melindungi keselamatan nyawa yang nyata-nyata mengancam, atau melindungi perasaan khawatir akan keselamatan nyawa dengan melakukan sesuatu diantara dua mudharat yang paling ringan resikonya.

¹⁶ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Bairut: Darul Fikr, tt) h. 167

Jadi, keterpaksaan ialah keadaan yang mendorong manusia kepada apa yang merusak serta membebarkannya atau mendorong untuk ke dalamnya. Secara garis besar, factor yang menyebabkan kepada kondisi darurat itu adakalanya berasal dari diri sendiri dan adakalanya dari orang lain.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi darurat sebagai berikut:

Darurat ialah datangnya kondisi atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kesukaran atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengan nya. Ketika itu boleh atau tidak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selamanya tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut di atas, bahwa dharurat itu menjangkau semua jenis kemudharatan, berhubungan dengan makanan, pengobatan, memelihara prinsip keseimbangan akad dalam berbagai transaksi, mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya.

Jadi jelaslah bahwa yang dipelihara adalah kemaslahatan bagi manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan pokok dari syariat Islam, yaitu memelihara atau menciptakan kemaslahatan manusia, sekaligus

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Nazhariat al-Dharurat al-Syar'iyat, Muqaranat ma' al-Qanun Wadh'I*, Terjemah; Said Agil al-Munawar dan Hadri Hasan, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.72

menghindarkan dari *mafsadat* (hal-hal yang merusak), baik di dunia maupun di akhirat.

E. Batasan-batasan Darurat

Dipahami dari definisi yang telah diuraikan di atas, bahwa terdapat batasan bagi darurat ataupun syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat itu. Karena itu jelaslah bahwa tidak semua orang yang mengklaim adanya darurat yang dapat diterima klaimnya atau dibenarkan perbuatanya-perbuatannya.

Adapun batasan dalam darurat mencakup dua hal, yaitu: Pertama, batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan, Kedua, ukuran yang boleh dikonsumsi orang yang sedang dalam keadaan darurat.¹⁸ Menurut para ulama madzhab Syafi'i, Kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian, sekalipun ia merasa takut selama sakit.

Jadi, darurat tersebut harus sudah ada dan bukan masih menunggu. Dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, Fikih Darurat, Terkemah, Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: pustaka Azzam, 1996), h.31

pengalaman yang ada; atau jika seseorang merasa yakin akan adanya bahaya yang hakiki terhadap lima kebutuhan yang mendasar yang kita sebut juga dipelihara oleh agama, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta. Oleh karena itu, seseorang boleh berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum guna menghindari bahaya, sekalipun hal itu dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi orang lain.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh” Apabila berhadapan dua mafsadat, maka jauhi yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya.

Fathurahman Djamil menjelaskan tentang lima pokok kemaslahatan berdasarkan peringkat dari masing-masing, sebagai berikut:¹⁹

- 1). Memelihara Agama (hifz al-Din), menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:
 - a). Peringkat darurat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
 - b). Peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jama’ dan shalat qashar bagi orang yang sedang dalam bepergian. Kalau

¹⁹ Fathurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.128

ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya.

c). Peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat Hal ini erat kaitannyadengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka hal itu akan mengancam eksestensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2). Memelihara Jiwa (*hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

a). Peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksestensi jiwa manusia.

b). Peringkat *hajjiyat*, seperti dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c). Peringkat *Tahsiniyyat*, seperti sisyaritkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi perkawinan.

3). Memelihara akal (*hifzh al- aql*)

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat *yaitu*:

- a). Peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum-minuman keras, jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Peringkat Hajjiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- c). Peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak berfaedah.

4.) Memelihara Keturunan(*hifzh al-Nasl*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingan,.

5) Memelihara Harta (*hifzh al-Mal*), memelihara harta, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

Jadi, dalam setiap peringkat, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan hukum syara'. Oleh sebab itu setiap hukum syara' tidak memiliki tujuan kecuali satu dianta tiga hal yang daapat mewujudkan kemaslahatan manusia ini.

F. Implikasi Darurat bagi perubahan hukum

Darurat memiliki ketetapan hukum. Di antara ketetapan- ketetapan hukum yang paling menonjol ialah bahwa kadang kaladarurat tersebut menyebabkan dibolehkannya yang dilarang. Dan kadang kala terbatas

pada perangkatnya tanggung jawab ukhrawi tanpa menghilangkan keharaman, dan kadangkala yang wajib serta mungkin juga ditundanya pelaksanaan yang wajib.²⁰

Dalam masalah pemaksaan, ialah dibolehkannya melakukan sesuatu perbuatan yang diharamkan ketika bebas, mungkin juga diberikan keringanan untuk itu, tetapi keharamannya tetap untuk selamanya dan tidak mungkin hapus keseluruhannya. Mungkin juga tidak dibolehkan dan tidak diberi keringanan sama sekali. Dengan demikian darurat itu dapat diklasifikasikan kepada empat bagian, yaitu:

Pertama, dibolehkannya perbuatan yang diharamkan, seperti melakukan sterilisasi baik bagi laki-laki maupun perempuan, hanya dikala menghadapi kesulitan.

Sebagaimana disebabkan dalam kaidah fiqh:

“ kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang ”

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa al Bazawi dan ulama tafsir serta ulama ushul lainnya mengatakan “ Allah mengecualikan keadaan darurat, dan pengecualian dari pengharaman berarti membolehkan, karena pembicaraan menjadi pengungkap dari apa yang berada dibalik yang dikecualikan, dan sebelum diharamkan ia

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, Fikih Darurat, Terjemah, Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997)h.31

adalah mubah, lalu ia tetap pada posisi yang semula ketika dalam keadaan darurat”

Kedua, diberi keringanan. Untuk melakukan perbuatan yang haram, dalam arti bahwa pemaksaan itu tidak dapat membolehkan perbuatan itu, karena keharamannya bersifat abadi, namun ia menghambat dosa dan siksaan ukhrawi, seperti mengucapkan kata-kata kafir di lidah tanpa mengusik iman di hati, maka itu dibolehkan dengan adanya pemaksaan yang *mulji* saja. Jika seseorang bersabar atas pemaksaan sampai ia terbunuh, maka ia menjadi syahid. Dan yang lebih utama menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali adalah tidak mengucapkan kata-katakufur guna menampakkan kekuatan Islam dan untuk mengangkat kalimat yang haqq, dengan mempraktekkan kisah Khatib ibnu ‘Addi dan ‘Ammar. Khatib dibunuh oleh orang-orang Mekkah karena ia tidak mau menerima pendirian keliru mereka. Dikalangan orang-orang Islam, ia lebih mulia daripada ‘Ammar yang mendapat pengakuan dari Rasul SAW yang mengatakan bahwa tahun-tahun mereka baik-baik saja. Easul SAW berkata kepadanya “ jika mereka telah kembali, maka kembalilah” yaitu jika mereka kembali menggunakan paksaan, maka kembali pulalah kamu menggunakan rukhsah, jika mereka kembali menggunakan paksaan maka kembalilah kamu kepada ketenteraman hati.

Allah SWT berfirman dalam al Qur’an surat an Nahl ayat 106:

Ketiga, tidak dibolehkan perbuatan yang dilarang, tetapi diberikan keringanan untuk melakukannya secara keseluruhan. Hal yang demikian itu adalah hak manusia seperti melenyapkan dan mengambil dengan paksa harta orang lain sebenarnya adalah perbuatan haram. Namun pengharaman ini dapat hilang dengan adanya persetujuan pemilik harta. Apabila seseorang dipaksa agar melenyapkan harta orang lain dengan paksaan mulji' atau seseorang terpaksa mengambil harta untuk dimanfaatkan, maka ia diberi keringanan tanpa menghilangkan pengharaman.

Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadits mengenai menghalalkan harta orang lain dalam keadaan darurat yaitu

“Dari Abi Daid, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda “Apabila salah seorang dari kalian menghampiri sebuah pagar dan ingin memakan buah yang ada di dalamnya, hendaklah ia memanggil “ Hai pemilik pagar! Sebanyak tiga kali untuk menunggu jawaban seseorang, kalau ternyata tidak ada jawaban, baru ia boleh memakannya. Dan apabila salah seorang dari kalian sedang berjalan dan mendapat seekor unta, lalu ia ingin meminum susunya, hendaklah ia memanggil, “Hai pemilik unta atau Hai pengembala unta! Untuk menunggu jawabannya, Kalau sudah tidak ada jawaban ia baru boleh meminumnya” (HR. Ahmad)

Keempat, tidak membuat perbuatan yang diharamkan menjadi boleh dan tidak pula diberi keringanan sama sekali, seperti membunuh

tanpa hak, merusak salah satu anggota tubuh dan berzina. Semuanya tidak menjadi halal karena adanya pemaksaan sekalipun. Pemaksaan terhadap masalah ini dengan metode istihsan , hanya dipandang sebagai *syubhat* yang dapat mencegah dilaksanakannya had (hukuman) Apabila pemaksaan itu benar-benar mulji', sebab hukuman yang dikenakan hanya bersifat membuat pelaku jera, sedangkan dalam keadaan terpaksa tidak perlu tindakan itu.²¹

²¹ Wahbah Zuhaili, , Op.Cit, h. 206

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hukum Islam mengatur penerapan konsep hukum Islam dalam keadaan darurat

Syari'at Islam di bangun dan didasarkan kepada kemudahan, keadilan, rahmat, dan mempertimbangkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Dzat Yang Maha Bijaksana telah menurunkan syari'at dengan penuh keluwesan dan kemudahan. Firman Allah SWT:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ
الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلًّا
مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

Artinya: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Hujurat: 7-8)²²

Salah satu ciri syari'at Islam yang secara pasti menunjukkan prinsip kemudahan dan toleransi ketika ada tuntutan untuk

²² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989) h.

mengamalkan hukum-hukum syari'at adalah pensyari'atan rukhsah merupakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah karena mempertimbangkan keberatan manusia dan dalam rangka memetui keperluan mereka dengan tetap mempertahankan sebab yang mengharuskan penerapan hukum dasar.

Tetapi apabila keadaan darurat disertai dengan adanya maksiat syar'i seperti merampok dan mengganggu keamanan dalam perjalanan, berlaku aniaya dan memerangi orang Islam; menciptakan keadaan yang tidak aman dan sebagainya. Apakah seseorang dibenarkan memanfaatkan ketetapan-ketetapan hukum pengucualian yang merupakan rukhsah ketika dalam keadaan darurat.

B. Penerapan Hukum Darurat bagi kemaslahatan pribadi dengan sterilisasi

Tujuan pokok dari syariat Islam. Yaitu: memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia, sekaligus menghindarkan dari mafsadat (hal-hal yang merusak), baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jelaslah bahwa syar'i sangat memperhatikan kemaslahatan pribadi seseorang. Kemaslahatan pribadi ini tidak bisa ditinggalkan kecuali apabila berhadapan dengan kemaslahatan yang lebih besar, atau kemaslahat pribadi merugikan orang lain. Misalnya, seorang perempuan yang sudah sering melahirkan kemudian divonis dokter ahli kandungan agar disterilisasi kandungannya, sebab jika tidak

akan membahayakan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini maka sterilisasi boleh dilakukan. Artinya dalam kondisi seperti ini berlaku kaidah fiqh:

“Jika ada dua bahaya mengancam maka di waspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya”

Karena itulah, Islam menetapkan bahwa apabila kepribadian seseorang terancam dalam keadaan darurat yang tidak bisa dihindari kecuali dengan jalan yang terlarang. Maka ia boleh melaksanakan yang terlarang itu, bahkan wajib. Para ulama fiqh telah membuat kaidah: “*adh-dharurah tubihu al-mahdzurat*” (keadaan darurat bias menyebabkan diperbolehkannya meraih hal yang terlarang)²³ Kaidah tersebut juga bermakna, segala kesulitan dan kesukaran yang tidak dapat dielakkan oleh manusia akan diberi keringanan oleh Allah SWT.

Seorang muslim hendaknya mengetahui bahwa dalam hidup ini banya hal yang tidak terduga dan diluar kemampuan pengetahuan manusia. Umpamanya dia sakit parah, maka dia harus percaya pada suratan takdir yang telah ditentukan Allah. Kendatipun demikian agama menyuruhnya untuk berobat dengan memanfaatkan berbagai

²³ M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 3013), h. 561

cara dan sarana-sarana pengobatan yang ada. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban untuk selalu bertawakkal kepada Allah, terutama bagi orang yang yakin sarana-sarana pengobatan tersebut adalah berkat adanya izin dan ketentuan dari Allah. Artinya semua itu tidak ada gunanya kecuali kalau memang sudah dikehendaki serta ditentukan oleh Allah SWT. Setiap penyakit yang diciptakan oleh Allah pasti ada obatnya. Jika obat dan penyakitnya cocok, maka dengan izin Allah ia akan sembuh. Sabda Rasulullah SAW:

“ Dari Jabir dari Nabi saw bahwa sesungguhnya beliau bersabda, bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat tersebut tepat mengenai penyakitnya, maka dengan izin Allah ia akan sembuh” (HR. Ahmad)²⁴

Selain bertawakkal, seorang muslim harus menggunakan sarana-sarana pengobatan yang telah diperbolehkan oleh Allah. Menggunakan sarana-sarana pengobatan dianjurkan seperti itu hakekatnya adalah mempercayai keputusan Allah, karena ia adalah bagian dari takdir-Nya.

²⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, (Bairut: Daar al-Fikri, 1991), h. 93

Hal ini adalah berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibn khuzamah:

“Dari Ibn Khuzamah dari ayahnya ia berkata, Wahai Rasulullah, dan berkata Sofyan: “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Rasulullah bagaimana menurut pendapat anda tentang usaha membaca mantra dan pengobatan yang biasa kami lakukan? Apakah itu berarti berpaling dari takdir Allah?” beliau menjawab, “itu adalah termasuk takdir Allah”, (HR. Ahmad).

Pengobatan dengan menggunakan mantra-mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti itu diperbolehkan. Karena kata-kata yang tidak dimengerti, tidak dapat menjamin akan bebas dari unsure-unsur kemusyrikan²⁵ Hal ini juga dikemukakan oleh Bagir al-Habsy yang menjelaskan kebolehan mengobati penyakit dengan do'a-do'a tertentu, baik yang diucapkan ataupun yang tertulis, sepanjang dapat dipahami maknanya dan isinya tidak bercampur dengan kemusyrikan.²⁶

Said aqil Husin menjelaskan bahwa para ulama ushul fiqh telah menetapkan sebab-sebab timbulnya keringanan, antara lain:

a). Musafir, seorang yang sedang berjalan jauh diperbolehkan tidak berpuasa, meng-qashar dan men-jama' shalat, meninggalkan shalat jum'at dan sebagainya.

²⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978) h.43

²⁶ Bagir al-Habsyi, *Fikih Prakis*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 238

b) Sakit, orang yang kesehatannya terganggu diperbolehkan tidak berpuasa, bertayamum, shalat dalam keadaan duduk dan sebagainya.

c). Terpaksa, seseorang yang bertindak di luar kehendaknya dimaafkan bila tindakannya pada hal-hal terlarang.

d). Lupa seseorang yang tidak melakukan kewajiban agama tidak dengansengaja (lupa) dapat dimaafkan. Kebodohan, seseorang yang melanggar ketetapan hukum tidak dikenakan sanksi karena tidak mengetahui akibat hukumnya.²⁷

Di antara keadaan-keadaan darurat (keterpaksaan) yang membuat sesuatu yang tak dibolehkan dalam keadaan yang biasa menjadi dibolehkan, adalah keadaan terpaksa. Orang yang dipaksa dengan paksaan yang tidak dapat ditolak, maka ia tidak berdosa melakukan apa yang dipaksakan itu, sekalipun berupa perbuatan kufur, yang merupakan tindak kejahatan terbesar dalam pandangan Islam.

Jika antara *mashalih* dan *mafasid* bertemu dalam satu perkara, atau antara hal yang merusak dan hal yang bermanfaat, haruslah diadakan perbandingan antara keduanya. Ukuran prioritas berada pada yang terbanyak membawa dampak, sebab yang banyak meliputi keseluruhan dari bagian.²⁸

²⁷ Said Agil Husin AL-Manar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, (Jakarta: Paramadina, 2014), h. 39

²⁸ Yusuf Qarhawi, Fikih Prioritas Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 38

Dengan demikian, jika mafsadat lebih besar dari pada manfaat dan maslahat yang muncul secara bersamaan, maka wajib dicegah kerana banyaknya mafsadat yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan apa menjadi dasar pertimbangan keselamatan hidup ibu yang lebih diutamakan dari pada nyawa janinnya; dimana kehidupan ibu di dunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janinnya belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak hidup dari pada janinnya; Mengorbankan ibu lebih banyak resekonya dari pada mengorbankan janinnya. Karena kalau ibu yang meninggal, maka semua anak yang ditinggalkan mengalami penderitaan, terutama bayinya yang baru lahir, tetapi kalau janinnya yang dikorbankan, maka resekonya lebih ringan dibandingkan dengan resekonya kematian ibunya.

Abu Zahrah mengutip pendapat imam Izzudin Abdus Salam, bahwa maslahat terbagi menjadi tiga macam, yaitu: **Pertama**, maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Maslahat wajib terbagi menjadi beberapa tingkat, yaitu: utama (*fadhil*), paling utama (*afdhal*), dan tengah-tengah (*mutawassith*). Maslahat paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadat paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan paling besar. Kemaslahatan ini wajib dikerjakan.

Kedua. maslahat yang disunahkan oleh Syar'i kepada hamba-Nya demi kebaikannya Tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit

dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah, dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati masalah yang mubah.

Ketiga, maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penulakan terhadap mafsadat. Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sehingga di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar maslahatnya dari sebagian lain. Cuma maslahat mubah ini tidak berpahala. Memakan buah-buahan, misalnya maslahatnya dapat dirasakan segera bagi pemakannya. Dengan demikian, perkara mubah mengandung maslahat, tetapi berlaku terbatas dan bersifat perorangan, dinikmati khusus bagi pelakunya.

Maslahat di sini meliputi maslahat keduniaan, maslahat keakhiratan, atau maslahat keduniaan dan keakhiratan sekaligus. Demikian pula akan halnya mafsadat tanpa diragukan sedikitpun.

Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam mengenai cara untuk mengetahui berbagai maslahat dan mafsadat, termasuk jenjang keduanya, yaitu sebagai berikut:

Kebanyakan maslahat dan mafsadat keduniaan diketahui melalui akal, dan itu merupakan bagian terbesar dari syari'at. Sebab, tidaklah samar bagi seorang yang berakal untuk mencapai kemaslahatan yang murni sebelum datangnya syari'at. Mencegah mafsadat yang murni dari jiwa orang atau selainnya adalah terpuji dan baik; mendahulukan maslahat yang paling tepat adalah terpuji lagi baik; mencegah mafsadah yang paling besar adalah terpuji dan baik; mendahulukan maslahat yang kuat daripada yang tidak kuat adalah terpuji lagi

baik; dan mencegah mafsadah yang kuat daripada maslahat yang kuat juga terpuji lagi baik.²⁹

Mengenai pembagian mafsadat, Abu Zahrah mengutip pendapat imam Izzuddin bin Abdis yang mengatakan bahwa mafsadat terbagi menjadi dua macam, yaitu: mafsadat yang diharamkan oleh Allah untuk didekati dan mafsadat yang tidak disukai oleh Allah (makruh) untuk dikerjakan. Selanjutnya, Imam Izzuddin menguraikan tingkatan masing-masing dua mafsadat tersebut sebagai berikut:

- a) Mafsadat yang diharamkan oleh Allah ada dua tingkatan, yaitu: pertama, tingkatan dosa besar (kabair), yang terbagi kepada dosa besar (kabir), dosa paling besar (akbar), dan tengah-tengah (mutawasith). Dosa paling besar adalah dosa yang paling banyak mafsadahnya, dan dosa besar adalah dosa yang paling sedikit mafsadatnya di antara dosa kabair. Mafsadat dosa kabair pada tingkatan paling rendah akan mencapai kepada mafsadat yang seandainya dikurangi lagi akan memasuki pada tingkatan dosa kecil (shagair), dan inilah tingkatan kedua dari mafsadat yang diharamkan.
- b) Mafsadat yang tidak disukai oleh Allah (makruh) untuk dikerjakan, yaitu apabila mafsadat shagair (dosa kecil) pada tingkatan yang paling rendah mencapai pada mafsadat yang seandainya dikurangi lagi niscaya akan sampai pada tingkatan mafsadat makruh paling tinggi. Dan mafsadat makruh paling rendah akan mencapai pada batas yang bila saja mafsadat itu hilang, maka akan memasuki pada kategori mubah.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka ada hubungan antara perintah Allah dan kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan yang diperintahkan, dan bahwa kualitas perintah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar maslahat yang terkandung di dalamnya. Seperti

²⁹ Yusuf Qardawi, h. 39

³⁰ Abu Zahrah, h. 560

halnya seseorang dokter melaksanakan sterilisasi karena dilandasi oleh beberapa faktor antara lain:

Indikasi Medis; yaitu biasanya dilakukan terhadap wanita yang mengindap penyakit yang dianggap dapat berbahaya baginya; seperti, penyakit jantung, penyakit paru-paru penyakit ginjal, Hypertansi dan lainnya. Sehingga apabila suami isteri dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat/emergency), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakalir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi diperbolehkan oleh Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam yang menyatakan:

الضرورة تبيح المحظورات

Keadaan darurat itu membolehkan hai-hal yang dilarang

ماأبىح لضرورة بقدر تعذرها

Sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa, adalah menurut kadar halangannya.

Dengan demian Islam hanya membolehkan sterilisasi laki-laki/wanita hanya semata-mata alasan medis. Selain alasan medis, seperti banyak anak atau kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk sterilisasi. Tetapi dapat memnggunakan cara-cara/alat-alat kontrasepsi yang diizinkan oleh Islam.

Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi keturunan

secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak dapat merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua.³¹ Artinya jika sterilisasi kandungan bagi laki-laki yang dikenal dengan vasektomi dan perempuan tubektomi bisa dikembalikan pada kondisinya seperti semula, maka diperbolehkan tetapi dihukumi makruh. Misalnya karena anaknya masih terlalu kecil dan menunggu sampai berusia dua atau tiga tahun. Namun jika ternyata kedua hal itu mematikan fungsi keturunan secara mutlak maka diharamkan.

Pada dasarnya Allah SWT memberikan amanah kepada umata untuk berketurunan, dengan harapan agar keturunan itu akan menjadi penerus perjuang kita dan menjadi unsur-unsur perbaikan dalam masyarakat. Karena itu Rasulullah SAW berpesan untuk memperbanyak keturunan dengan Sabda Rasulullah: “nikahilah wanita yang banyak keturunan karena aku berbanyak-banyak jumlah dengan umat yang lain”.

Syariah Islam tidak melarang seseorang untuk melakukan KB dengan sterilisasi jika dilakukan berdasarkan motivasi-motivasi pribadi dengan syarat-syarat yang sesuai syar’i, seperti *daf’ul haraj*

59 ³¹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib*, Bairut, tt, juz, 2, h.

(menolak kesempitan), *ad-dharar yuzaal* (bahaya harus di hilangkan). Sebagaimana ciri khas ajaran Islam dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Hajj ayat 78:

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Untuk itu berkaitan dengan pencegahan atau pembatasan kehamilan, para ulama telah membuat beberapa fatwa, antara lain:

Dalam Mukhtamar Lembaga Riset Kairo bahwa sesungguhnya Islam menganjurkan untuk menambah dan memperbanyak keturunan, karena banyaknya keturunan akan memperkuat umat Islam secara sosial, ekonomi dan militer. Menambah kemuliaan dan kekuatan. Jika terdapat darurat yang bersifat pribadi yang mengharuskan pembatasan keturunan, maka kedua suami isteri harus diperlakukan sesuai dengan kondisi darurat, dan batasan darurat ini dikembalikan kepada hati nurani dan kualitas agama setiap pribadi.

Badan ulama Besar Arab Saudi melarang melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh menolak kehamilan jika sebabnya adalah takut miskin. Karena Allah yang memberi rejeki, tidak ada binatang di bumi kecuali Allah-lah yang menanggung rejekinya. Adapun jika mencegah kehamilan karena darurat yang jelas, seperti jika wanita tidak mungkin melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan

anaknya. Atau melambatkan untuk jangka waktu tertentu karena kemaslahatan yang dipandang suami isteri maka tidak mengapa untuk mencegah kehamilan atau menundanya.

Majelis Lembaga Fiqh Islami menetapkan secara sepakat tidak boleh melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh juga menolak/mencegah kehamilan kalau maksudnya karena takut kemiskinan. Karena Allah yang member rezeki dan semua binatang di bumi Allah tentukan rezekinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum dalam keadaan darurat dari umat serta hal-hal yang diperlukan demi kemaslahatan pribadi, Syari'at Islam membolehkannya, karena kemaslahatan pribadi harus diutamakan.
2. Sterelisasi dalam pandangan Islam adalah diharamkan dikarenakan merubah bentuk ciptaan Allah, dengan sterelisasi/diangkat atau dibuang potensi untuk mempunyai keturunan tidak ada lagi. Namun demikian Syari'at Islam sangat memperhatikan kemaslahatan pribadi seseorang, dan kemaslahatan pribadi ini tidak bisa ditinggalkan, artinya jika tidak dilakukan sterelisasi kandungan akan mengancam jiwanya, sesuai dengan kaidah fiqh yaitu; jika ada dua bahaya saling mengancam maka waspadai yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang paling ringan bahayanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sulaiman, A. Wahhab Ibrahim, *Pengaruh Darurat dan Hajat dalam Hukum Islam*, alih bahasa, Agil al-Munawwar dan Hadri Hasan, Semarang Dina Utama 1998
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fikih Darurat*, Diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq dari aslinya Al-Idhthirar Ilal Ath'imah Wal Adwiyah Al-Muharramaat, Jakarta Pustaka Azzam, 1996
- Abu Habieb, Sa'di, *Enseklopedi Ijma'*, terjemah Sahal Mahfudz, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemah; Halimuddin Jakarta: PT Renika Cipta, 1999
- Bagir al-Habsyi, *Fikih Prakis*, Bandung: Mizan, 2002
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Huhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Terjemah: Moh. Zuhri, Darul Ikhy Indonesia, 1980
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT.NPustaka Rizki Putra, 2001
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Bairut: Daar al-Fikri, 1991
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, Bairut, tt.juz, 2, Manna' al-Qathan, *al-Tasyri' wa al-fiqh fi al-Islam*, Bairut: Muasasah al-Risalah, 1987
- M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2013
- Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, Alih bahasa: Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1996
- Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978

Yusuf Qarhawi, *Fikih Prioritas Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996